

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM SEKTOR  
PARIWISATA DI KABUPATEN LUMAJANG PADA TAHUN 2016 – 2017

Desy Mega Wahyuningtyas  
Jurusan Akuntansi - Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
[desymega66@gmail.com](mailto:desymega66@gmail.com)

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan analisis data yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2017. Selama ini sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan tetapi belum terlalu optimal yang dikarenakan masih sedikitnya sumber penerimaan pendapatan asli daerah dan minimnya sumber daya manusia yang terkait dengan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerahnya dan juga pentingnya melakukan pengembangan dalam sector pariwisata. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci: PAD, Pariwisata, Intensifikasi, Ektensifikasi.

Abstract - This study aims to describe efforts to increase local revenue in the tourism sector in Lumajang Regency. The research approach is done by interview method, observation and data analysis related to revenue of original region in 2016-2017. So far, there has been an effort by the local government to increase the local revenue but it is not optimal yet due to the lack of sources of local revenue and the lack of human resources related to the payment of local taxes and user charges as well as the importance of doing development in the tourism sector. In order to increase local revenue, the Regional Government needs to intensify and extensification in the hope that it can increase the local revenue in Lumajang Regency.

Keywords: PAD, Tourism, Intensification, Ektensifikasi.

## **PENDAHULUAN**

Di negara maju berwisata adalah hal yang biasa dilakukan dan menjadi kebutuhan hidup setiap orang, hal inilah yang menggerakkan ekonomi pada sektor pariwisata kian terus berkembang. Di negara berkembang, khususnya di Indonesia telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Terkait dengan keindahan alam yang ada di Indonesia. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, yaitu dikeluarkannya Undang-undang Tahun 2009 No 10 tentang kepariwisataan adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Sektor pariwisata di Indonesia telah menjadi penyumbang terbesar ketiga terkait dengan devisa untuk negara Indonesia. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Lumajang dengan keberagaman suku bangsa yang hidup dalam kedamaian dengan toleransi yang tinggi sehingga merupakan aset yang berharga. Obyek wisata yang beragam juga akan menambah daya tarik wisatawan. Aset inilah yang membuat seni, budaya dan tradisi di Kabupaten Lumajang yang dikenal dengan sebutan Kota Pisang menjadi lebih unik, kaya, beragam dan berkarakter. Kabupaten Lumajang memiliki obyek wisata unggulan ini sehingga dapat membantu perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Lumajang semakin meningkat. Dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan secara baik akan mendorong kunjungan wisatawan domestik maupun asing, peningkatan jumlah kunjungan tentunya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk mengembangkan dan mengatur serta mengelola wilayah darat dan laut secara mandiri, khususnya pada pariwisata. Perimbangan keuangan daerah memberi peluang pada pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat yang besar dari pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

## **KAJIAN TEORI**

Pendapatan Asli Daerah menurut **Halim dan Kusufi** (2012:101) merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan

menurut Undang-Undang no 33 tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah antara lain Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga pendapatan lain-lain yang sah.

Pariwisata menurut **Undang-Undang No 10 Tahun 2009** adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan juga pemerintah daerah. Menurut **Kurniawan (2013:61)** pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, dan juga kebudayaan yang merupakan objek sosiologi. Pengembangan objek wisata **Ferry Prianggra (2012)** dapat diartikan suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk membuat segala sesuatunya lebih baik yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan senang, dengan demikian akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata.

## **PEMBAHASAN**

### ***Mini Research 1: Peran dan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017***

Di dalam penelitian ini, jumlah kenaikan pendapatan asli daerah dapat dilihat seberapa besar peranan dan sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang terhadap pada tahun 2016-2017. Di dalam penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar presentase pertumbuhan dan

kontribusi yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan potensi-potensi daerah yang ada di Kabupaten Lumajang.

**Tabel 1.1.**

**Presentase pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang terhadap pada tahun 2016-2017**

	2016			2017		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 210,612,079,600	Rp 242,395,115,251	115%	Rp 339,157,371,000	Rp 245,362,563,125	72%
1. Pajak Daerah	Rp 43,810,000,000	Rp 47,424,601,696	108%	Rp 51,600,000,000	Rp 54,156,334,941	105%
2. Retribusi Daerah	Rp 27,381,237,974	Rp 26,948,394,716	98%	Rp 44,228,709,500	Rp 33,520,059,292	76%
3. Hasil Pengelolaan kekayaan	Rp 3,067,561,000	Rp 2,995,914,935	98%	Rp 3,087,561,000	Rp 2,983,324,803	97%
4. Pendapatan lain-lain yang sah	Rp 136,353,280,626	Rp 165,066,203,904	121%	Rp 240,241,100,500	Rp 154,702,844,088	64%

**Sumber:** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa, Pendapatan Asli Daerah yang terbesar adalah dimulai dari :

1. Pendapatan lain-lain yang sah.
2. Pajak Daerah.
3. Retribusi daerah.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

**Mini Research 2: Sumber dan peran penerimaan pendapatan dalam sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017**

Pada penelitian ini, jumlah kenaikan pendapatan terhadap pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata dapat dilihat seberapa besar peranan dan sumber pendapatannya. Dan di bawah ini merupakan sumber pendapatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017 yang dapat di lihat di tabel 1.2. bawah ini.

**Tabel 1.2.**  
**Pendapatan Dalam Sektor Pariwisata**

	2016			2017		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	2,000,000,000	2,398,451,000	120%	2,500,000,000	2,622,531,500	105%
Pemandian Alam Selokambang	1,150,000,000	1,406,429,000	122%	1,600,000,000	1,612,789,000	101%
Water Park	720,000,000	794,862,500	110%	725,000,000	743,050,000	102%
Segitiga Ranu	80,000,000	103,988,000	130%	90,000,000	145,080,000	161%
Pantai Bambang	-	20,250,000	-	10,000,000	24,000,000	240%
Pantai Wot Galih	-	7,500,000	-	7,500,000	10,000,000	133%
Pantai TPI Permai Tempursari	25,000,000	28,004,000	112%	25,000,000	35,225,000	141%
Goa Tetes	25,000,000	26,425,000	106%	20,000,000	9,395,000	47%
Tumpak Sewu				10,000,000	10,000,000	100%
Puncak B-29				10,000,000	10,000,000	100%
b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	10,992,500	-	-	32,992,500	
Sewa Tanah untuk ATM Bank Jatim	-	2,992,500	-	-	2,992,500	
Sewa Tanah di sekitar Selokambang	-	8,000,000	-	-	10,000,000	
Sewa Tanah untuk menara seluler (KWT)				-	20,000,000	

**Sumber:** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Dalam tabel 1.2. diatas secara keseluruhan pendapatan yang akan diperoleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp 2.500.000.000. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2016-2017 adalah sebesar Rp 2.398.451.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 2.622.531.500 dengan presentase 120% dan 105% dari anggaran. Pendapatan tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk Restribusi Jasa Usaha khususnya Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Pemakaian Kekayaan Daerah. Pelampauan target pendapatan ini tidak terlepas dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pendapatan yang telah dilakukan selama tahun 2017.

**Mini Research 3: Hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang**

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Holab selaku kepala bidang destinasi dan pengembangan Dinas Pariwisata maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yaitu Kurangnya ketersediaan dana yang di berikan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Lumajang. Hal ini

disebabkan karena pemerintah daerah lebih focus dalam melakukan pembangunan untuk fasilitas umum di Kabupaten Lumajang.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Holab selaku kepala bagian destinasi dan pengembangan pariwisata maka penulis menyimpulkan bahwa hambatannya yaitu minimnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengembangan sektor pariwisata. Sumber daya manusia yang minim dapat berpengaruh terhadap kinerjanya. Peningkatan kinerja di setiap pengembangan pariwisata di Kabupaten Lumajang sangat di perlukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang.
3. Berdasarkan hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yaitu kurang mengertinya petugas pariwisata yang terkait dengan pentingnya retribusi daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dimana hal ini dibuktikan masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para petugas pariwisata, yaitu berupa banyaknya ketidaksesuaian jumlah tiket masuk dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi obyek wisata tersebut. Kecurangan ini menimbulkan rendahnya pendapatan pariwisata terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupten Lumajang.
4. Berdasarkan hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yaitu akses transportasi yang kurang memadai yang merupakan suatu hambatan terpenting dalam pariwisata untuk melakukan pelayanan dalam segi kualitas dan kuantitas. Seperti sulitnya akses menuju beberapa wisata di Kabupaten Lumajang. Hal ini di buktikan banyak sekali jalanan rusak untuk menuju ke beberapa tempat wisata di Kabupaten Lumajang. Selain itu ada beberapa tempat wisata yang tata pemetaannya kurang pas dan seringkali membuat para wisatawan menjadi bingung dimana pintu masuk yang sebenarnya.
5. Berdasarkan hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yaitu kurangnya promosi di dalam bidang IT, dimana pada era modern ini semua bisnis bergantung pada IT. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum menyediakan website yang lengkap, hanya ada beberapa obyek wisata

yang memiliki website. Namun tidak mencakup semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang.

#### **Mini Research 4: Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lumajang**

Selain dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pajak dan Retribusi juga mengalami beberapa hambatan yang terkait dalam peningkatan pendapatannya. Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi:

1. Berdasarkan hasil analisis data maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi yaitu belum efektifnya pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan penarikan pajak, sehingga diperlukan pendataan ulang dari berbagai objek pajak. Hal ini dibuktikan banyaknya potensi pajak yang belum di gali oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ani salah satu pedagang di obyek wisata maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yaitu adanya kekecewaan dari para pedagang karena ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkan dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Dinas Kabupaten Luamajang. Banyak sekali para pedagang di sekitar tempat wisata yang megalami kekecewaan ini, karena fasilitas yang di berikan hanya seadanya saja. Dengan adanya kejadian ini maka para pedagang enggan membayar retribusi dan tidak patuh dalam membayarnya. Sehingga hal ini membawa dampak buruk terhadap pendapatan dalam retribusi jasa usaha.
3. Berdasarkan hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa kurangnya kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya baik pada pemungutan pajak daerah maupun pemungutan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan masih terdapat adanya petugas pemungut yang sulit melaksanakan pemungutan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan bisa di katakan tidak tepat waktu dan tidak disiplin. Hal ini dibuktikan dengan adanya 652 Pegawai Negeri Sipil yang di mutasi dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pada pegawai negeri sipil dan pemerintah tersebut.

### **Mini Research 5: Upaya dalam mengatasi hambatan**

#### **1. Upaya dalam mengatasi hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang**

- 1.1. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor pariwisata dari pembayaran retribusi daerah, pajak hotel dan juga pajak restoran, diantaranya melalui diadakannya sosialisasi terkait kewajiban kepatuhan pemenuhan perpajakan, pemberian dan penegakkan *punishment* sebagaimana sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah pusat. Dengan adanya itu maka akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu mengeksplere kemudian merawat objek wisata baru yang ada di Lumajang. Sehingga ini akan membantu pendapatan dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Dengan melakukan hal tersebut maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang.
- 1.2. Melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya para petugas pajak dan pariwisata guna mendukung kegiatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Sehingga wisata di Kabupaten Lumajang akan lebih maju dan berkembang.
- 1.3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap para petugas pariwisata terkait pentingnya retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah harus selalu melakukan pemantauan dan pengecekan secara tiba-tiba. Dan apabila ada petugas yang melakukan fraud maka harus ada *punishment* yang diberikan.
- 1.4. Memperbaiki akses jalan menuju tempat wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Selain itu juga harus memperbaiki pengelolaan yang ada di tempat wisata agar kenyamanan dapat dirasakan oleh wisatawan. Dan juga melakukan perbaikan dalam pemetaan di setiap objek agar wisatawan tidak bingung dalam menuju tempat wisatanya.
- 1.5. Membuat website yang berisi tentang semua objek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Selain itu juga dapat promosi melalui media social

lainnya seperti Instagram, facebook dan juga twitter. Selain itu juga bekerja sama dengan biro perjalanan yang menyediakan jasanya dalam melakukan perjalanan pariwisata di Kabupaten Lumajang.

## **2. Upaya terkait hambatan yang dialami oleh Badan Pajak dan Retribusi daerah.**

- 2.1. Melakukan pendataan ulang dari semua objek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Baik objek wisata yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun yang dikelola oleh desa. Yang diharapkan dapat di kelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Dengan adanya hal itu maka Dinas Pariwisata dapat mengoptimalkan pendapatan pariwisata terhadap total pendapatan asli daerah
- 2.2. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat sesuai dengan yang di janjikan oleh pemerintah. Sehingga dengan tercukupinya fasilitas yang telah dijanjikan maka bukan alasan lagi bagi para pedagang dalam tidak membayar retribusi. Dengan adanya hal tersebut maka akan meningkatkan retribusi daerah. Untuk mrningkatkan pendapatan para pedagang Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang pada sektor perdagangan yaitu melalui program-program antara lain mempermudah penerbitan Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP), menambah secara kuantitas pelaksanaan seperti pameran atau Lumajang expo. Pada setiap tahunnya selalu ada Lumajang expo. Sedangkan pada tahun 2017 Lumajang sudah mengadakan Lumajang Tempoe Doelo yang di lakukan setahun sekali tepatnya untuk merayakan hari jadi Kabupaten Lumajang.
- 2.3. Melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya para petugas pemungutan pajak. Dimana semakin tinggi sumber daya manusia maka akan semakin professional dalam menjalankan tugasnya. Dengan bekal pelatian maka akan berdampak lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, perlu menggunakan konsep *value for money* untuk mengukur ekonomi, efektifitas dan efisiensi kinerja para petugas pajak daerah. Sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata. Sebagaimana kondisi geografis di Kabupaten Lumajang sangat mendukung. Yaitu dengan banyaknya wisata alam.

Upaya dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui intensifikasi yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan secara tepat dan optimal dalam sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain penerimaan pendapatan asli daerah yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan adanya sistem dan prosedur yang tepat, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan dan keuangan daerah tidak lagi berfokus pada sektor pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasi, seperti fungsi pendataan, fungsi pembukuan, fungsi penetapan dan fungsi pelaporan serta perencanaan dan pengendalian operasional.
- b. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh petugas pemungutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa secara dadakan dan berkala.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang. Dengan sumber daya manusia yang baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja seseorang tersebut.
- d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang terkait pentingnya membayar pajak untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lumajang.
- e. Melakukan pelatihan tentang bagaimana cara memaksimalkan pelayanan di setiap tempat wisata untuk membuat para wisatawan enjoy dalam berkunjung di wisata yang ada di Kabupaten Lumajang.

- f. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di daerah wisata yang terkait dengan pentingnya pengembangan wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang.

Sementara ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak atau mencari potensi yang belum terdata atau yang belum dipungut. Upaya untuk melakukan ekstensifikasi adalah :

- a. Dengan mencari dan melakukan eksploritasi sektor unggulan yang memiliki potensi terbesar dalam sumber pendapatan asli daerah seperti pariwisata.
- b. Mengoptimalkan peran dari realisasi investasi dengan melakukan penanaman modal, dengan melakukan penanaman modal maka akan menjadikan Kabupaten Lumajang menjadi lebih maju dan berkembang,
- c. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dengan melakukan upaya menegakkan hukum bagi petugas pajak, dalam memeriksa ulang seluruh objek pajak. Namun, apabila petugas pajak tidak melakukan tugasnya dengan baik maka petugas mendapatkan punishment.
- d. Melakukan pengecekan dalam wisata-wisata yang ada di Kabupaten Lumajang dalam penarikan retribusi daerah.
- e. Melakukan pengecekan dan pendataan ulang yang terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran yang berada di beberapa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang.

Untuk mendukung kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka petugas perlu melakukan penagihan terhadap masyarakat yang telah melakukan penunggakan pembayaran pajak daerah yaitu memberikan surat peringatan atas penunggakan pajak agar masyarakat segera melakukan pembayaran pajaknya. Perlu juga dilakukan penumbuhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran kewajibannya untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lumajang

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan hasil dari menganalisis Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan terhadap pendapatan asli daerah Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017 dapat dikatakan cukup baik karena bisa mencapai lebih dari target yang ditentukan pada setiap sumber pendapatannya. Sumber pendapatan meliputi pajak daerah, pendapatan lain-lain yang sah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan juga retribusi daerah. Pencapaian peningkatan pada setiap sumber pendapatan asli daerah yang terus meningkat menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mampu mencapai potensinya dengan baik.
2. Di dalam sektor pariwisata berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017 pendapatannya semakin membaik. Dimana mengalami peningkatan pada tahun 2017. Dan juga adanya penambahan objek wisata baru yang telah masuk dalam pendapatan asli daerah. Antara lain wisata puncak B-29 dan air terjun tumpak sewu. Penambahan objek wisata dalam meningkatkan pendapatan terhadap total pendapatan asli daerah, yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini menunjukkan bahwa mampu dalam melakukan pengembangan objek wisata baru yang ada di Kabupaten Lumajang.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang memang cukup banyak yaitu kurangnya kontribusi pendapatan pariwisata, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap terhadap total pendapatan asli daerah, selain itu juga kurang lengkapnya fasilitas yang ada di objek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Sehingga hal ini yang menjadikan hambatan dalam mengoptimalkan

penerimaan daerah walaupun dalam realisasinya sudah berhasil mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi pihak BPKD menyatakan akan tegas dalam mengawasi para wajib pajak dan melakukan penarikan retribusi daerah dengan rutin dan berkala. Selain itu dari Dinas Pariwisata akan melakukan peningkatan pelayanan dan penambahan fasilitas pada setiap obyek wisata di Kabupaten Lumajang. Dan juga memperbaiki akses jalan untuk menuju tempat wisata di Kabupaten Lumajang. Sehingga hal ini akan membuat nyaman para wisatawan dalam berkunjung di objek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang.

## **SARAN**

Dari berbagai kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, untuk masukkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Rekomendasi yang akan di berikan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu akan selalu berusaha menggali potensi-potensi yang dapat dijadikan objek pajak agar pencapaian target dan realisasi dapat tercapai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pengembangan pariwisata lebih efektif, efisien dan memadai. Sedangkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang akan terus menggali objek wisata yang belum di eksplere dan belum di rawat dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus melakukan upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi yang sudah dijalankan dengan baik sehingga di tahun berikutnya realisasi tersebut dapat melebihi target yang telah direncanakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang.
2. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang harus meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun berikutnya. Peningkatan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah yang terjadi harus dipertahankan, diharapkan agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga penerimaan daerah yang berguna bagi

pengembangan objek wisata dapat terus menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan objek wisata agar Kabupaten Lumajang lebih maju.

3. Seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang diharapkan dapat melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas.
4. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari membayar pajak dan persepsi wajib pajak terhadap pemerintah juga membaik.
5. Sebaiknya melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dengan baik. Dengan cara bekerjasama dengan investor swasta untuk menciptakan laba bagi investor, pemerintah dan juga masyarakat. Misal dengan melakukan pembangunan hotel di area wisata di Lumajang. Dengan adanya pembangunan ini maka akan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah mengenai pajak hotel. Sedangkan bagi masyarakat setempat dengan adanya hotel maka area di sekitar wisata pasti akan banyak pengunjung, sehingga para masyarakat yang memiliki usaha di sekitar hotel akan mengalami keuntungan juga. Selain itu adanya penambahan fasilitas MCK di setiap pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang, agar wisatawan mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan wisatanya.
6. Untuk dapat meminimalisir kecurangan yang ada pada retribusi daerah berupa tiket masuk wisata, sebaiknya diperlukan adanya suatu koperasi yang menangani jumlah tiket pada setiap harinya. Sehingga seluruh aktivitas yang berkaitan dengan jumlah tiket yang keluar dan masuk dapat dicek dan di pantau dengan baik oleh koperasi. Selain itu koperasi ini juga alat bagi masyarakat setempat untuk masalah perdagangan agar tidak terjadi persaingan antar kompetitor. Sehingga nantinya diharapkan seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Lumajang di lengkapi dengan café yang layak, nyaman dan

harga yang sama. Dengan adanya koperasi ini maka semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas di tempat wisata akan menjadi terorganisir.

7. Untuk menjadikan wisata Lumajang menjadi wisata unggulan, perlu adanya peningkatan pada Information Technology (IT). Dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus membuat video profil pada setiap obyek wisata. Dan pembuatan video ini harus dilakukan secara berkala. Dengan adanya video profil ini maka akan menjadi daya tarik wisatawan domestik ataupun manca negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pada era modern seperti ini media utama dalam suatu bisnis yaitu media social. Banyak sekali wadah sebagai promosi wisata yang ada di Kabupaten Lumajang antara lain melalui website, Instagram, facebook dan juga media social lainnya. Dengan melalui video profil ini maka upaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang akan lebih dikenal masyarakat luas dan akan lebih maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Deritasari Tegar Mahadika. Volume 3 Nomor 2. Tahun 20014. Upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui sector Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah: edisi keempat Jakarta: Salemba empat : Jakarta
- Halim Abdul & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.
- Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata. Jakarta
- Kurniawan Zandrato 2013. Kebudayaan dan Pariwisata Nias, Bekasi . Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta ; Andi
- Mayers Koen. 2009. Tentang Pariwisata. “ Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata”. Jakarta : Unesco Office
- Peraturan Menteri Pariwisata No 14 Tahun 2016. Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 21 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pitana, I Gede. Dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta. Penerbit Andi

Putu Dewa Oka Prasiasa. 2011. Wacana Kontemporer. Salemba Humanika

Renyowijoyo, Muindro 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Edisi 3, Mitra Wacana. Jakarta.

Suartha Nyoman, S.H., M. SI. I Gusti Gede Purwa Sudarto.,S.E.,M.M

Undang- Undang no 10 tahun 2009 tentang pariwisata

Undang- Undang no 33 tahun 2004 pasal 1 tentang pendapatan asli daerah.

Widodo Heru Prasetyo. Peranan Dinas Pariwisata dalam mempromosikan objek wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Universitas Tribhuwana Tungadewi. Malang.

Yani Ahmad. 2009 . Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta

Dinas Informasi dan Komunikasi. 2018. Keadaan wilayah Kabupaten Lumajang. [https://lumajangkab.go.id/profil/gbr\\_umum.hp](https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.hp) (diunduh tanggal 9 Mei 2018)